



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

POLICY BRIEF

Nomor: 09/PB/PKPEI/VII/2026 - Jakarta, 10 Juli 2026

Pariwisata sebagai Sektor versus Pariwisata sebagai Ekosistem

*Analisis Kerangka Definisi, Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, dan
Argumen Reframing Anggaran Kementerian Pariwisata T.A. 2027*

Ringkasan Eksekutif

Kajian ini mengidentifikasi ketidakselarasan struktural antara definisi pariwisata yang digunakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menetapkan pagu anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dengan definisi yang digunakan dalam dokumen perencanaan nasional dan instrumen pengukuran kinerja Kemenpar sendiri.

Tiga temuan utama:

- Kemenkeu menggunakan cara pandang "pariwisata sebagai sektor" — merujuk pada KBLI I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Rp639 T atau ~2,9% PDB) — dalam menentukan pagu anggaran Kemenpar. Cara pandang ini hanya mencakup dua dari sepuluh Tourism Characteristic Industries dan tidak menghitung efek pengganda lintas lapangan usaha.
- RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2027 yang ditetapkan Bappenas mengandung inkonsistensi internal: di satu sisi menggunakan KBLI I untuk target pertumbuhan lapangan usaha (8,7–9,3%), di sisi lain menggunakan definisi ekosistem untuk target PDB pariwisata (4,7–4,8%), wisman, devisa, dan tenaga kerja. Dua definisi berbeda hadir dalam satu dokumen tanpa rekonsiliasi.
- IKU (Indikator Kinerja Utama) Kemenpar dan seluruh kegiatan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) T.A. 2027 secara konsisten menggunakan logika ekosistem — mencakup 10+ lapangan usaha lintas KBLI. Kemenpar diukur kinerjanya dengan definisi ekosistem tetapi dibiayai dengan logika sektor sempit. Ini adalah paradoks struktural yang menjadi akar dari underinvestment anggaran pariwisata.
- Terdapat lapisan ketidakselarasan ketiga yang teridentifikasi dalam kajian ini: RKP dan RKA T.A. 2027 disusun menggunakan KBLI 2020, sementara KBLI 2025 (Peraturan BPS No. 7/2025, terbit 18 Desember 2025) sudah wajib digunakan sejak 15 Juni 2026. KBLI 2025 mengubah struktur Kategori I secara signifikan — hotel dipecah per kelas bintang, OTA mendapat kode tersendiri, klasifikasi makan-minum berubah berbasis karakter bangunan. Ini menciptakan putus rantai data (data series break) yang akan menyulitkan evaluasi ketercapaian target RKP 2027.

Argumen kebijakan: RKP 2027 sendiri sudah mengakui definisi ekosistem. Kemenkeu tidak dapat secara logis berpegang pada KBLI I (2020) sementara Bappenas menggunakan definisi ekosistem dalam dokumen perencanaan yang sama. Pagu Indikatif Rp1.010 M (0,158% dari KBLI I 2020) setara hanya 0,097% dari kontribusi ekosistem — jauh di bawah benchmark Thailand (0,6%) dan Singapura (2,2%). Penyelesaian Tourism Satellite Account (TSA) oleh BPS adalah prasyarat untuk merekonsiliasi dua definisi ini secara permanen. Catatan tambahan: KBLI 2025 sudah wajib berlaku mulai 15 Juni 2026; seluruh dokumen perencanaan T.A. 2027 masih menggunakan KBLI 2020 dan perlu direkonsiliasi.



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

1. Pendahuluan dan Latar Belakang

Alokasi anggaran Kementerian Pariwisata T.A. 2027 — Pagu Indikatif Rp1.010 M, yang merupakan terendah secara historis sejak 2016 dan turun 29,6% dari DIPA 2026 — memunculkan pertanyaan mendasar tentang cara pandang yang digunakan dalam proses penganggaran: **apakah pariwisata diperlakukan sebagai sektor sempit atau sebagai ekosistem ekonomi yang lebih luas?**

Pertanyaan ini bukan sekadar akademis. Cara pandang yang dipilih secara langsung menentukan berapa anggaran yang dianggap "proporsional" dan "wajar" untuk Kemenpar. Jika pariwisata hanya mencakup KBLI I (akomodasi + makan-minum), maka anggaran kecil tampak masuk akal. Jika pariwisata dipahami sebagai ekosistem yang menggerakkan 10+ lapangan usaha dan 25,91 juta tenaga kerja, maka anggaran yang sama terlihat sangat tidak memadai.

Kajian ini menelaah: (1) dua kerangka definisi dan komponennya; (2) data empiris kontribusi ekonomi dari masing-masing definisi; (3) sinkronisasi antara definisi yang digunakan Kemenkeu dengan RKP 2027 dan IKU/RKA Kemenpar; serta (4) implikasi kebijakan dan rekomendasi.

2. Dua Cara Pandang: Kerangka Definisi

2.1 Pariwisata sebagai Sektor — Cara Pandang Kemenkeu

Dalam Neraca Nasional BPS mengacu pada Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008), pariwisata secara langsung teridentifikasi melalui **Kategori I — Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** (Accommodation and Food Service Activities). Ini adalah satu-satunya kategori KBLI yang secara eksplisit berhubungan dengan layanan langsung kepada wisatawan dalam struktur PDB menurut lapangan usaha.

Ketika Kemenkeu menilai "seberapa besar sektor yang dilayani Kemenpar," acuan alaminya adalah KBLI I karena inilah yang terlihat dalam neraca nasional. Nilai KBLI I tahun 2025: **Rp639,0 T** (akomodasi Rp135,5 T + makan-minum Rp503,5 T), atau sekitar 2,9% dari PDB nasional ~Rp22.000 T. [Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2026]

2.2 Pariwisata sebagai Ekosistem — Cara Pandang TSA/WTTC

Tourism Satellite Account (TSA) adalah instrumen statistik internasional yang dirancang oleh UN Tourism/UNWTO untuk mengukur kontribusi ekonomi pariwisata secara komprehensif — melampaui batas kategori KBLI. TSA mendefinisikan pariwisata berdasarkan **sisi permintaan**: seluruh aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh pengeluaran wisatawan, bukan sisi produksi (KBLI).

TSA mengidentifikasi **10 Tourism Characteristic Industries** (industri inti) ditambah **Tourism Connected Activities** (industri terhubung). Dengan metodologi ini, kontribusi pariwisata ke PDB Indonesia 2025 mencapai **Rp945,7–1.143,4 T** atau 3,97–4,80% PDB — hampir dua kali lipat angka KBLI I. [Sumber: WTTC; Master Deck Substansi Menpar, 2025]

Indonesia belum memiliki TSA yang lengkap. Master Deck Kemenpar mencatat secara eksplisit: "data sementara BPS menunggu Tourism Satellite Account." Ini berarti angka 3,97–4,80% masih bersifat estimasi berdasarkan metodologi WTTC (World Travel & Tourism Council), bukan publikasi resmi BPS.



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

3. Tabel Perbandingan Komprehensif Dua Cara Pandang

Tabel 1 merangkum perbedaan antara dua cara pandang dalam sepuluh dimensi analisis.

Dimensi Analisis	Pariwisata sebagai Sektor (Cara Pandang Kemenkeu)	Pariwisata sebagai Ekosistem (Cara Pandang TSA/WTTC)
Istilah teknis resmi	Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Accommodation and Food Service Activities)	Tourism (Kepariwisataan) — seluruh aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh permintaan wisatawan, diukur melalui Tourism Satellite Account (TSA)
Dasar metodologi	Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008) — PDB menurut Lapangan Usaha yang dikompilasi BPS	UN Tourism / UNWTO Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008 (TSA:RMF 2008)
Kode referensi di Indonesia	KBLI 2020, Kategori I: • Golongan 55 — Penyediaan Akomodasi • Golongan 56 — Penyediaan Makan Minum	TSA mencakup 10 Tourism Characteristic Industries lintas KBLI (H, I, G, N, R) ditambah Tourism Connected Activities (A, F, J, K, Q)
Landasan normatif	Peraturan BPS tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) — untuk keperluan neraca nasional	UU No. 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan; RPJPN 2025–2045 ("pengembangan berbasis ekosistem"); RPJMN 2025–2029
Versi KBLI yang berlaku	KBLI 2020 — acuan aktif dalam seluruh data BPS hingga saat ini, termasuk Statistik Indonesia 2026 dan rilis PDB triwulanan. Catatan penting: KBLI 2025 (Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025, terbit 18 Des 2025) wajib digunakan mulai 15 Juni 2026 dalam sistem OSS/AHU, RKP dan RKA T.A. 2027 disusun menggunakan KBLI 2020 karena drafting dilakukan sebelum KBLI 2025 terbit.	KBLI 2020 — data TSA yang ada mengacu pada struktur KBLI 2020. Catatan: KBLI 2025 menambahkan Kategori ke-22 dan mengakomodasi sektor baru (AI, platform digital, karbon) berdasarkan ISIC Revisi 5. Transisi ini belum tercermin dalam dokumen perencanaan T.A. 2027.
Status di Indonesia (2025–2026)	Tersedia dan diperbarui rutin oleh BPS dalam rilis PDB triwulanan	Dalam proses. Master Deck Kemenpar 2025 mencatat: "data sementara BPS menunggu Tourism Satellite Account." TSA belum sepenuhnya tersedia.
Komponen industri yang dicakup	Hanya dua lapangan usaha: (1) Penyediaan Akomodasi (2) Penyediaan Makan Minum	10 Tourism Characteristic Industries + Tourism Connected Activities (lihat Tabel 2)
Kontribusi ke PDB — 2025	Rp639,0 T (nilai nominal) = ~2,9% PDB nasional ~Rp22.000 T (Akomodasi Rp135,5 T + Makan Minum Rp503,5 T) [Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2026]	Rp945,7–1.143,4 T = 3,97–4,80% PDB nasional (efek langsung + tidak langsung + induksi, pengganda 1,7) [Sumber: WTTC; Master Deck Kemenpar 2025]
Tenaga kerja yang dihitung	Hanya pekerja di usaha akomodasi dan restoran/katering (estimasi ~5–8 juta)	25,91 juta tenaga kerja pariwisata (2025) — lintas semua lapangan usaha dalam rantai industri inti dan pendukung [Sumber: Master Deck Kemenpar 2025]
Posisi Kemenpar dalam kerangka ini	Operator sektor sempit — setara kementerian yang mengurus satu kategori KBLI. Anggaran kecil dianggap proporsional.	Enabler lintas ekosistem — memungkinkan 10+ lapangan usaha dan 25,91 juta tenaga kerja berfungsi optimal. Anggaran harus proporsional terhadap dampak ekosistem.
Cara Kemenkeu menggunakan ini dalam keputusan anggaran	Pagu Indikatif Kemenpar 2027 = Rp1.010 M dianggap proporsional karena dibandingkan hanya dengan KBLI I (Rp639 T) → rasio 0,16%	Jika digunakan: Pagu Rp1.010 M terhadap PDB Ekosistem Rp1.044 T → rasio hanya 0,097% — jauh di bawah benchmark ASEAN (Thailand 0,6%; Singapura 2,2%)



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

Tabel 1. Perbandingan Pariwisata sebagai Sektor (KBLI I) versus Pariwisata sebagai Ekosistem (TSA/WTTC). Sumber: BPS; UNWTO TSA:RMF 2008; Master Deck Substansi Menpar (2025); RKA KL Kemenpar T.A. 2027.

4. Cakupan Industri: Apa yang Masuk dan Apa yang Keluar

Tabel 2 merinci seluruh komponen industri berdasarkan masing-masing pendekatan. Bagian A menunjukkan dua lapangan usaha yang dicakup pendekatan sektor (KBLI I). Bagian B menunjukkan 10 Tourism Characteristic Industries dalam kerangka TSA. Bagian C menunjukkan Tourism Connected Activities yang menghasilkan nilai tambah secara tidak langsung dari aktivitas pariwisata.

No.	Komponen Industri	KBLI	Keterangan / Data Indonesia 2025
A. PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR — Pendekatan BPS / Kemenkeu — KBLI 2020, Kategori I			
1	Penyediaan Akomodasi	55	Hotel, motel, villa, homestay, wisma, bumi perkemahan, kos wisata Nilai tambah 2025: Rp135,5 T
2	Penyediaan Makan Minum	56	Restoran, rumah makan, warung makan, kafe, bar, catering Nilai tambah 2025: Rp503,5 T
	TOTAL KBLI I		Rp639,0 T ~2,9% PDB nasional Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2026
B. PARIWISATA SEBAGAI EKOSISTEM — 10 Tourism Characteristic Industries (TSA/UNWTO)			
1	Akomodasi untuk pengunjung	55	Hotel, resort, hostel, homestay, akomodasi wisata lainnya
2	Penyajian makan dan minum	56	Restoran, rumah makan, catering, warung kuliner wisata
3	Transportasi darat penumpang	49	Bus pariwisata, kereta, taksi, ojek, kendaraan sewa
4	Transportasi air penumpang	50	Kapal wisata, feri, perahu, cruise
5	Transportasi udara penumpang	51	Maskapai penerbangan, charter, seaplane
6	Penyewaan alat transportasi	77	Rental mobil, motor, sepeda, kapal charter
7	Agen perjalanan dan tour operator	79	Biro Perjalanan Wisata (BPW), OTA, penyelenggara wisata
8	Jasa kebudayaan	90–91	Museum, pertunjukan seni, gedung teater, festival budaya
9	Jasa olahraga dan rekreasi	92–93	Taman hiburan, wahana, olahraga wisata, penyewaan peralatan
10	Perdagangan ritel wisata	G	Toko souvenir, duty-free, kerajinan, galeri seni
C. TOURISM CONNECTED ACTIVITIES — Dampak Tidak Langsung & Rantai Pasok			
C1	Pertanian, peternakan, perikanan	A	Rantai pasok bahan pangan untuk akomodasi & restoran wisata
C2	Konstruksi dan real estat destinasi	F, L	Pembangunan hotel, resort, infrastruktur destinasi, KEK Pariwisata
C3	Teknologi informasi & platform digital	J	OTA (Booking, Airbnb), e-visa, sistem reservasi, aplikasi wisata
C4	Jasa keuangan dan asuransi	K	Asuransi perjalanan, penukaran valuta asing, kartu kredit wisata
C5	Kesehatan dan wellness	Q	Medical tourism, spa, wellness retreat, klinik kecantikan wisata
C6	Pendidikan dan pelatihan	P	Poltekpar, sekolah perhotelan, pelatihan pemandu wisata
C7	MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions)	—	Kongres internasional, pameran dagang, wisata insentif korporat



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

No.	Komponen Industri	KBLI	Keterangan / Data Indonesia 2025
C8	Ekonomi kreatif	R, C	Kuliner khas, fesyen batik & tenun, kriya, film, musik, pertunjukan

Tabel 2. Komponen industri pariwisata berdasarkan pendekatan sektor (KBLI I) dan ekosistem (TSA/UNWTO). Sumber: KBLI 2020 (BPS); UNWTO TSA:RMF 2008; BPS Statistik Indonesia 2026.

5. Data Empiris: Kontribusi Ekonomi Pariwisata Indonesia 2025

Tabel 3 menyandingkan data empiris kontribusi ekonomi pariwisata Indonesia 2025 berdasarkan dua pendekatan. Gap antara dua angka inilah yang menjadi akar dari underestimasi peran Kemenpar dalam proses penganggaran.

Indikator Ekonomi	Pariwisata sebagai Sektor (KBLI I — BPS)	Pariwisata sebagai Ekosistem (TSA — WTTC/Kemenpar)	Keterangan
Nilai tambah / kontribusi ke PDB (Rp, 2025)	Rp639,0 T	Rp945,7–1.143,4 T	Selisih Rp306–504 T tidak terlihat oleh Kemenkeu
Kontribusi ke PDB (% , 2025)	~2,9%	3,97–4,80%	TSA menggunakan pengganda ekonomi 1,7
Tenaga kerja (2025)	~5–8 juta (estimasi KBLI I)	25,91 juta	Kemenpar mencatat sebagai IKU: TK keempat terbesar nasional (Q3 2025)
Pertumbuhan sektor/ekosistem (target RKP 2027)	8,7–9,3% (lapangan usaha akomodasi, makan dan minum)	Target PDB pariwisata 4,7–4,8%	Dua angka berbeda dalam satu dokumen RKP 2027 → inkonsistensi definitif
Devisa pariwisata (2025)	Tidak terukur dari KBLI I saja	US\$18,27 Md = Rp305,4 T	Devisa adalah IKU Kemenpar, bukan indikator KBLI I
Investasi pariwisata (2025)	Hanya investasi di hotel & restoran	Rp73,56 T (lintas sektor)	Investasi bukan IKU tingkat Menteri
Target 2027 (RPJMN)	Pertumbuhan akomodasi-mamin 8,7–9,3%	Wisman 17,6–19,1 jt, devisa US\$25,5–28,6 Md, TK 27,33 jt, PDB 4,7–4,8%	Target RPJMN berbasis ekosistem; pagu anggaran berbasis sektor

Tabel 3. Perbandingan kontribusi ekonomi pariwisata berdasarkan definisi sektor (KBLI I) dan ekosistem (TSA). *Kontribusi PDB 3,97–4,80% = estimasi berbasis metodologi WTTC; belum merupakan data TSA resmi BPS. Sumber: BPS Statistik Indonesia 2026; WTTC; Master Deck Substansi Menpar (2025); RKP T.A. 2027.

6. Analisis Sinkronisasi: RKP, RKA, dan IKU Kemenpar 2027

6.1 Bagaimana RKP 2027 Mendefinisikan Pariwisata

Dokumen RKP T.A. 2027 yang disusun oleh Bappenas memuat dua definisi pariwisata secara bersamaan. Dalam halaman yang membahas Target Ekonomi Nasional, RKP menyebut target pertumbuhan "lapangan usaha akomodasi, makan dan minum" sebesar 8,7–9,3% — yang merupakan bahasa KBLI I (sektor sempit). Namun dalam halaman yang membahas mandat pariwisata, RKP menggunakan target "Kontribusi PDB ke Pariwisata" 4,7–4,8%, wisman 17,6–19,1 juta, devisa US\$25,5–28,6 Md, dan tenaga kerja 27,33 juta — yang semuanya berbasis definisi ekosistem.

Dua definisi ini tidak dapat direkonsiliasi satu sama lain tanpa instrumen TSA yang lengkap. Ketidadaan TSA resmi menciptakan ruang ambiguitas yang secara tidak sengaja menguntungkan posisi Kemenkeu dalam negosiasi anggaran.



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

6.2 Matriks Sinkronisasi

Tabel 4 memetakan tingkat sinkronisasi antara cara pandang KBLI I (Kemenkeu), RKP 2027 (Bappenas), dan IKU & RKA Kemenpar dalam empat dimensi.

Dimensi	Cara Pandang KBLI I (Dasar Pagu Kemenkeu)	RKP 2027 (Bappenas)	IKU & RKA Kemenpar 2027
Indikator output yang diukur	Pertumbuhan lapangan usaha akomodasi, makan dan minum (KBLI I) = 8,7–9,3% → Definisi sektor sempit	GANDA: (1) Lapangan usaha akomodasi-mamin 8,7–9,3% [KBLI I] (2) Kontribusi PDB pariwisata 4,7–4,8% [Ekosistem] (3) Wisman, devisa, TK [Ekosistem] → Dua definisi dalam satu dokumen	IKU Menpar: Wisman, ASPA, Devisa, Wisnus, TK, Kontribusi PDB Pariwisata → Semua berbasis definisi ekosistem. Tidak ada IKU berbasis KBLI I.
Intervensi yang ditetapkan	Hanya relevan untuk KBLI 55 (akomodasi) dan KBLI 56 (makan-minum). Tidak mencakup destinasi, pemasaran, SDM lintas sektor	Enam intervensi Kemenpar dalam RKP: (1) Peningkatan kualitas SDM (2) Pengembangan destinasi (3) Pengembangan industri & rantai pasok inklusif (4) Pemasaran pariwisata (5) Pengembangan atraksi & event (6) Penguatan keberlanjutan → Semua melampaui KBLI I	RKA Kemenpar 5 Direktorat: D1 SDM & Kelembagaan D2 Destinasi & Infrastruktur (KBLI F,L) D3 Industri & Investasi (KBLI 79, Q, Ekraf) D4 Pemasaran (seluruh industri) D5 Events (KBLI R, 90, 93) → Jauh melampaui KBLI I
Definisi 'pariwisata' yang dipakai	Sektor sempit: KBLI I (Penyediaan Akomodasi + Makan Minum) = Rp639 T, ~2,9% PDB → Konsisten dalam dirinya sendiri	CAMPURAN dalam satu dokumen: • Lapangan usaha → KBLI I • PDB pariwisata 4,7–4,8% → Ekosistem • TK pariwisata 27,33 jt → Ekosistem • Devisa US\$25,5–28,6 Md → Ekosistem → Inkonsistensi internal	Ekosistem — konsisten: PDB pariwisata 3,97–4,80% = Rp945–1.143 T TK 25,91 juta (2025) Devisa US\$18,27 Md → Diukur dan dilaporkan secara konsisten
Status sinkronisasi	KONSISTEN dalam dirinya sendiri. Masalahnya bukan inkonsistensi internal melainkan ketidaksesuaian dengan RKP dan RKA.	TIDAK KONSISTEN INTERNAL — menggunakan dua definisi tanpa rekonsiliasi dalam satu dokumen perencanaan.	KONSISTEN (ekosistem) — tetapi tidak sinkron dengan cara Kemenkeu menetapkan pagu.

Tabel 4. Matriks sinkronisasi antara cara pandang KBLI I (Kemenkeu), RKP 2027 (Bappenas), dan IKU & RKA Kemenpar T.A. 2027. Sumber: RKP T.A. 2027; RKA KL Kemenpar T.A. 2027; Master Deck Substansi Menpar (2025).

6.3 Empat Titik Ketidakselarasan Spesifik

Tabel 5 mengidentifikasi empat titik ketidakselarasan konkret yang dapat dijadikan dasar argumen kebijakan dalam pembahasan anggaran dengan Kemenkeu dan DPR.

No.	Dimensi Ketidakselarasan	Bukti Spesifik dalam Dokumen Resmi	Konsekuensi & Implikasi Kebijakan
1	Dualisme indikator PDB dalam satu dokumen RKP 2027	RKP 2027 halaman 3: target pertumbuhan "lapangan usaha akomodasi, makan dan minum" 8,7–9,3% (KBLI I — sektor sempit). RKP 2027 halaman 4: target "Kontribusi PDB ke Pariwisata" 4,7–4,8% (ekosistem — lebih luas). Keduanya tidak dapat diukur dengan instrumen yang sama.	Kemenkeu dapat berpegang pada angka 8,7–9,3% untuk memotong pagu; Kemenpar perlu mencapai 4,7–4,8%. Tanpa klarifikasi, Kemenpar selalu dalam posisi tuntutan yang melampaui kapasitas anggaran yang dialokasikan.
2	IKU Kemenpar diukur dengan logika ekosistem,	IKU Menpar 2027: wisman 17,6–19,1 juta; ASPA US\$1.447–1.497; devisa US\$25,5–28,6 Md; TK 27,33 juta; PDB pariwisata 4,7–4,8%. Semua adalah indikator ekosistem. Tidak	Terjadi structural mismatch: Menpar diukur kinerjanya menggunakan definisi ekosistem, namun sumber daya yang dialokasikan hanya mencerminkan nilai sektor sempit. Ini



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

No.	Dimensi Ketidakselarasan	Bukti Spesifik dalam Dokumen Resmi	Konsekuensi & Implikasi Kebijakan
	dibiayai dengan logika sektor	satu pun IKU berbasis KBLI I (pertumbuhan KBLI I bukan IKU Menpar). Pagu indikatif ditetapkan Kemenkeu berdasarkan KBLI I.	menciptakan ekspektasi yang tidak kompatibel dengan anggaran.
3	Seluruh intervensi RKP melampaui KBLI I	Enam intervensi Kemenpar dalam RKP 2027: (1) SDM — lintas semua KBLI; (2) Destinasi — KBLI F & L; (3) Industri & rantai pasok — eksplisit cross-KBLI; (4) Pemasaran — mendorong seluruh industri wisata; (5) Atraksi & event — KBLI R, 90, 93; (6) Keberlanjutan — lintas sektor. Tidak ada satu pun intervensi yang eksklusif untuk KBLI 55–56.	Intervensi yang ditetapkan dalam RKP sendiri sudah mengakui bahwa Kemenpar harus bekerja lintas KBLI. Kemenkeu tidak dapat secara logis menetapkan pagu berdasarkan KBLI I sementara dokumen perencanaan yang disepakati mengandaikan intervensi lintas ekosistem.
4	RKA Kemenpar mencakup industri di luar KBLI I	D3 Industri & Investasi: BPW (KBLI 79), wisata kesehatan (KBLI Q), gastronomi, fesyen, dan kriya (ekraf). D2 Destinasi: konstruksi dan pemeliharaan sarana destinasi (KBLI F). D5 Events: atraksi budaya dan entertainment (KBLI R, 90, 93). Seluruh kegiatan ini menghasilkan nilai tambah di luar KBLI I.	Tidak ada mekanisme dalam sistem APBN saat ini yang mengakui kontribusi Kemenpar terhadap KBLI di luar kategori I. Nilai lintas-KBLI yang dihasilkan oleh RKA Kemenpar tidak terhitung dalam justifikasi anggaran.
5	Dokumen perencanaan T.A. 2027 menggunakan KBLI 2020 — sementara KBLI 2025 sudah wajib berlaku	KBLI 2025 (Peraturan BPS No. 7/2025) diterbitkan 18 Desember 2025 dan wajib digunakan dalam sistem OSS/AHU mulai 15 Juni 2026. RKP 2027 dan RKA Kemenpar disusun sebelum KBLI 2025 terbit, sehingga seluruh angka, target, dan nomenklatur masih menggunakan KBLI 2020. BPS merilis tabel konversi KBLI 2020 → KBLI 2025 pada 23 April 2026. Dalam KBLI 2025, hotel dipecah per bintang (5 kode terpisah), OTA mendapat kode tersendiri (tidak lagi di bawah akomodasi), dan klasifikasi makan-minum berubah berbasis karakter bangunan.	Terjadi putus rantai data (data series break): target RKP 2027 "lapangan usaha akomodasi, makan dan minum 8,7–9,3%" menggunakan definisi KBLI 2020, tetapi BPS akan memproduksi data realisasi berbasis KBLI 2025 mulai H2 2026. Evaluasi ketercapaian target menjadi tidak apple-to-apple. Ini adalah lapisan ketiga ketidakselarasan — di luar paradoks sektor/ekosistem yang sudah ada.

Tabel 5. Empat titik ketidakselarasan antara cara pandang KBLI I dan dokumen perencanaan/kinerja Kemenpar. Sumber: RKP T.A. 2027; RKA KL Kemenpar T.A. 2027.

7. Implikasi terhadap Alokasi Anggaran Kemenpar

Tabel 6 membandingkan rasio Pagu Indikatif Kemenpar T.A. 2027 (Rp1.010 M) terhadap kontribusi PDB berdasarkan masing-masing definisi. Rasio ini memberikan perspektif yang lebih jelas tentang seberapa kecil anggaran Kemenpar dibandingkan dengan nilai ekonomi yang dihasilkan.

Basis Definisi yang Digunakan	Kontribusi ke PDB 2025 (Rp)	Pagu Indikatif Kemenpar T.A. 2027 (Rp)	Rasio Pagu / Kontribusi
Sektor sempit (KBLI I) [Cara pandang aktual Kemenkeu]	Rp639,0 T	Rp1.010,1 M	0,158% Nilai mutlak kecil karena dasar denominator sempit
Ekosistem (TSA, titik tengah) [Cara pandang yang lebih tepat]	Rp1.044,6 T (titik tengah Rp945,7–1.143,4 T)	Rp1.010,1 M	0,097% Jauh di bawah benchmark Thailand (0,6%) & Singapura (2,2%)



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

Basis Definisi yang Digunakan	Kontribusi ke PDB 2025 (Rp)	Pagu Indikatif Kemenpar T.A. 2027 (Rp)	Rasio Pagu / Kontribusi
Gap — nilai yang tidak terlihat Kemenkeu	Rp305–504 T	—	Rp305–504 T kontribusi PDB pariwisata tidak dihitung dalam dasar alokasi anggaran Kemenpar
Dana Ideal Juara ASEAN [Skenario benchmark project]	Rp1.044,6 T (ekosistem)	Rp6.766,1 M	0,648% ≈ benchmark Thailand; ROI anggaran 148× perputaran

Tabel 6. Perbandingan rasio Pagu Indikatif Kemenpar T.A. 2027 terhadap kontribusi PDB pariwisata berdasarkan definisi sektor dan ekosistem. Benchmark: Thailand ~0,6%; Singapura ~2,2% (rasio anggaran promosi/kontribusi PDB pariwisata, 2025). Sumber: Kemenpar; BPS; WTTC; TAT/STB Annual Report.

Kesimpulan implikasi: Kemenkeu menetapkan rasio 0,158% (sektor sempit), yang tampak kecil namun dianggap proporsional karena denominatornya juga kecil. Jika denominatornya diubah ke kontribusi ekosistem Rp1.044,6 T, rasio yang sama menjadi 0,097% — lebih kecil lagi dan jelas jauh di bawah benchmark regional. Skenario Dana Ideal Juara ASEAN (Rp6.766 M) baru mencapai rasio 0,648%, setara benchmark Thailand.

8. Rekomendasi Kebijakan

8.1 Jangka Pendek: Reframing Argumen Anggaran

- Kemenpar perlu secara eksplisit memisahkan dua definisi dalam setiap presentasi anggaran kepada DPR dan Kemenkeu: "lapangan usaha KBLI I" (basis pagu) versus "ekosistem pariwisata" (basis kinerja dan IKU). Memperlihatkan gap antara keduanya adalah argumen yang paling efektif.
- Dalam pembahasan RKA, Kemenpar dapat menggunakan inkonsistensi internal RKP 2027 sendiri — yang mengandung kedua definisi — sebagai dasar untuk menuntut penyesuaian pagu: jika Bappenas menggunakan definisi ekosistem untuk IKU, maka Kemenkeu seharusnya juga menggunakan definisi yang sama untuk pagu.
- Siapkan satu lembar ringkasan yang menunjukkan: setiap rupiah anggaran Kemenpar menghasilkan Rp148 perputaran ekonomi (Dana Ideal JA). Tidak ada sektor lain dalam APBN yang memiliki ROI anggaran setinggi ini.

8.2 Jangka Menengah: Penyelesaian Tourism Satellite Account

- Dorong percepatan penyelesaian Tourism Satellite Account (TSA) Indonesia oleh BPS — ini adalah satu-satunya instrumen yang dapat merekonsiliasi dua definisi secara resmi dan permanen. Selama TSA belum tersedia, ambiguitas definitif akan selalu dimanfaatkan oleh pihak yang ingin membatasi anggaran Kemenpar.
- TSA yang lengkap akan menghasilkan angka kontribusi PDB pariwisata yang berstatus resmi (bukan estimasi WTTC), yang dapat digunakan sebagai dasar penganggaran berbasis ekosistem yang tidak dapat dibantah secara statistik.
- Rekomendasikan kepada Bappenas agar RKP 2028–2029 hanya menggunakan satu definisi konsisten — dan secara eksplisit memilih definisi ekosistem sesuai amanat UU Kepariwisata No. 18 Tahun 2025 dan RPJPN 2025–2045.



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

8.3 Jangka Panjang: Reformasi Sistem Penganggaran

- Dorong Kemenkeu dan Bappenas untuk mereformasi sistem penganggaran K/L berbasis ekosistem — di mana anggaran K/L dinilai berdasarkan kontribusi terhadap seluruh ekosistem yang diaktifkannya, bukan hanya sektor KBLI yang secara langsung dikelolanya.
- Angkat pariwisata sebagai sektor cross-cutting dalam APBN — serupa dengan bagaimana Kemenko Perekonomian mengkonsolidasi anggaran lintas K/L. Kemenpar sebagai enabler berhak mendapat mekanisme anggaran yang mencerminkan perannya yang melampaui satu KBLI.

9. Penutup

Pertanyaan "apakah pariwisata adalah sektor atau ekosistem" bukan sekadar perdebatan akademis tentang terminologi. Ia menentukan seberapa besar anggaran yang dianggap layak, seberapa luas intervensi yang dianggap relevan, dan seberapa tinggi target yang dianggap realistis untuk Kementerian Pariwisata.

Paradoks yang teridentifikasi dalam kajian ini — Kemenpar diukur dengan definisi ekosistem tetapi dibiayai dengan logika sektor — bukan kegagalan Kemenpar, melainkan celah sistemik dalam desain perencanaan dan penganggaran pariwisata Indonesia. Celah ini dapat dan harus ditutup melalui penyelesaian TSA, konsistensi definisi dalam RKP, dan reframing argumen anggaran yang berbasis data.

Selama gap ini tidak diselesaikan, berapapun besarnya target pariwisata yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJPN akan selalu menghadapi hambatan struktural yang sama: anggaran yang tidak mencukupi karena dasarnya yang salah.

Jakarta, 10 Juli 2026

Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia

Center for Indonesian Economic & Tourism Studies



Muhammad Rahmad

Direktur Eksekutif

Hp. 081282050404

Policy brief ini disusun oleh Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia sebagai masukan independen bagi Pemerintah Republik Indonesia. Korespondensi: Direktur Eksekutif PKPEI, Graha Cempaka Mas Blok C 12A, Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat 10640.

Tentang PKPEI

PKPEI — Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia — adalah lembaga kajian independen yang berfokus pada keterkaitan antara industri pariwisata dengan kebijakan ekonomi nasional. Riset PKPEI mencakup ekonomi pariwisata, daya saing destinasi, wisata bisnis dan MICE,



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

diplomasi ekonomi yang melibatkan sektor pariwisata, serta reposisi Indonesia dalam arsitektur pariwisata global.

Policy Brief ini disusun berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, European Commission, serta riset pasar dari lembaga-lembaga terpercaya seperti Astute Analytica, International Congress and Convention Association, dan European Travel Commission. Kunjungi PKPEI di <https://pusatkajianpariwisata.id>

BOARD OF RESEARCHERS

Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia (PKPEI)
Center for Indonesian Economic & Tourism Studies

Nama / Name	Jabatan / Position
Dr. Muhammad Rahmad, S.Ag, S.Par, MM, MITM	Direktur Eksekutif / Koordinator Peneliti
Elyn Hastriana, BBA, M.Par	Direktur / Peneliti
Assoc. Professor Dr. Rahmat Ingkadijaya, MM, QCRO	Peneliti Senior
Assoc. Professor Dr. Nurbaeti, MM, QRGP	Peneliti Senior
Assoc. Professor Dr. Arief F. Rachman, SST. Par, MT	Peneliti Senior
Assoc. Professor Hera Oktadiana, Ph.D, CHE	Peneliti Senior
Assoc. Professor Dr. Drs. Amrullah, SH, M. Hum, M. Si Par	Peneliti Senior
Assoc. Professor Dr. Devita Gantina, SST. Par, M. Par	Peneliti Senior
Asst. Professor Agus Riyadi, SST. Par, M. Sc, Ph.D, CHIA, QCRO	Peneliti Senior
Asst. Professor Dr. M. Husen Hutagalung, S. Pd, M. Si	Peneliti Senior
Asst. Professor Dr. Ir. Doni Muhandiansyah, M. Si., ERMCP, CERG, CCGO	Peneliti Senior
Asisten Ahli Dr (c) Rianto, SST. Par, M. Si Par	Peneliti Senior
Dr. Andi M Yasin, S.H., M.KN, C.L.A	Peneliti Senior

Para peneliti PKPEI merupakan akademisi dan praktisi yang memiliki kedalaman pengalaman langsung di industri pariwisata, diplomasi internasional, serta pengembangan kebijakan publik. Setiap kajian berlandaskan teori dan metodologi ilmiah yang ketat, diperkaya wawasan praktis dari pengalaman puluhan tahun menangani dinamika pariwisata secara nyata.

Policy Brief ini disusun oleh Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia sebagai kontribusi analisis kebijakan independen. Isi brief tidak merepresentasikan posisi resmi lembaga pemerintah manapun. Untuk sitasi: Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia (2026), "Satu Dari Tiga Pekerjaan Baru di Dunia Lahir Dari Pariwisata: Mengelola Pariwisata Indonesia Jangan Setengah Hati, Policy Brief No.08/PB/PKPEI/VII/2026